

Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. VIII, No. 2, Desember 2020

ISSN 2355-8326

PENANGANAN KRISIS PARTAI DARI PANDANGAN PUBLIK

Aditya Seva Arnata
Muhammad Fiqri Ilhamy

Universitas Palangka Raya
E-mail : adityasevaarnata07@gmail.com
muhammadfiqriilhamy@gmail.com

Abstrak

Politik dengan magnitudo besar dirasakan oleh partai politik semenjak 1 sampai 2 tahun terakhir. Nyaris seluruh partai – partai politik partisipan pemilu baik partai lama ataupun partai baru hadapi krisis yang menyebabkan guncangan organisasi serta efeknya evaluasi negatif dari publik serta hilangnya keyakinan publik (distrust). Riset ini memakai dua (2) tata cara studi ialah sesi awal melaksanakan content analysis serta discourse analysis, setelah itu selanjutnya melaksanakan survei. Riset ini menampilkan kalau tidak seluruh partai politik sanggup mengalami krisis internal partainya yang diakibatkan oleh sebagian aspek diantara sikap korupsi serta terseretnya kader partai mereka dalam perkara korupsi. Setelah itu konflik internal jadi aspek lain terbentuknya krisis serta setelah itu pelanggaran etika yang dicoba kader partai politik. Menyusutnya keyakinan publik kepada partai politik lebih banyak diakibatkan oleh kasus – kasus korupsi yang ialah pengkhianatan publik, konflik internal serta pelanggaran kode etik. Dalam mengalami suasana itu partai politik wajib meyakinkan dengan langkah nyata pro terhadap pemberantasan korupsi dengan menindak tegas kader – kader yang ikut serta dan membetulkan kinerja politiknya. Setelah itu dibutuhkan kemampuan permasalahan serta pengalaman dan ketenangan dalam mengelola krisis sehingga luas akibat krisis bisa dikendalikan.

Kata Kunci : partai politik, strategi politik, penanganan krisis

Abstract

Politics with a large magnitude has been felt by political parties since the last 1 to 2 years. Almost all political parties participating in the election, both old and new parties, are facing a crisis that causes organizational shocks and the effect is a negative evaluation from the public and a loss of public confidence (distrust). This research uses 2 (two) study methods, namely the initial session carrying out content analysis and discourse analysis, after that, conducting a survey. This research shows that not all political parties are able to experience internal party crises caused by several aspects between the attitude of corruption and the dragging of their party cadres in corruption cases. After that, internal conflict became another aspect of the formation of the crisis and after that the ethical violations committed by political party cadres. The shrinking public confidence in political parties is mostly caused by cases of corruption, namely public betrayal, internal conflicts and violations of the code of ethics. In such an atmosphere, political parties are obliged to convince them with concrete steps towards eradicating corruption by taking firm action against cadres who participate and correcting their

political performance. After that, it takes the ability to problem and experience and calm in managing the crisis so that the extent of the crisis can be controlled.

Keywords : *political parties, political strategy, crisis handling*

PENDAHULUAN

Membangun sistem politik yang dilandasi sistem kepartaian yang kokoh merupakan suatu pekerjaan yang Panjang serta meletihkan. Diperlukan semangat, kerja keras serta membangun keyakinan dari tingkatan publik hingga elite buat mengokohkannya. Dikala ini, partai politik yang diharapkan sanggup jadi agregasi kepentingan konstituennya nyatanya belum sanggup mengartikulasikannya hingga pada tingkatan kebijakan di parlemen. Partai politik terjebak dalam kontestasi perebutan kekuasaan tanpa memperkenalkan pemecahan kesejahteraan. Konstituen hanya disuguhkan konflik antar partai politik, konflik internal partai politik serta yang sangat menegaskan krisis partai politik merupakan pengkhianatan partai politik dengan banyaknya kader partai politik bersinggungan dengan permasalahan korupsi.

Krisis dengan magnitude besar yang dirasakan oleh partai politik mencuat semenjak 2 tahun terakhir. Nyaris seluruh partai- partai politik partisipan pemilu baik partai lama ataupun partai baru hadapi krisis yang menyebabkan guncangan organisasi serta efeknya evaluasi negatif dari publik serta hilangnya keyakinan public (distrust). Distrust yang terjalin dalam warga terhadap partai politik berakibat untuk berjalannya proses politik baik dalam pemilu ataupun pilkada. Krisis ialah sesuatu keadaan dimana partai hadapi sesuatu kasus yang diakibatkan oleh bermacam aspek.

Penyusutan keyakinan publik kepada partai politik bawa pengaruh besar terhadap budaya politik paling utama pasca reformasi dimana sistem kekuasaan mencari orang bergeser jadi orang mencari kekuasaan. Kontestasi mencapai kekuasaan ditampilkan dengan vulgar lewat project politik pencitraan semu serta mengandalkan pragmatisme dalam mencapai kekuasaan. Aplikasi politik transaksional bisa menodai hasil pemilu yang diharapkan menciptakan Indonesia maju serta beradab.

METODE

Riset ini memakai tata cara studi ialah melaksanakan Content Analysis terhadap terdiri dari 5 media online (detik.com, viva.co.id, kompas.com, okezone.com, merdeka.com) buat memperoleh nama- nama partai politik yang sangat memperoleh sorotan pemberitaan terpaut krisis partai yang warna tertentu dalam demokrasi di Indonesia. Persoalannya, apakah warna itu ialah warna alami ataukah warna menyesuaikan diri hasil impor dari negeri lain yang secara historis- kultural berbeda dengan negara ini?

Satu perihal yang tentu, dalam konteks demokrasi kontemporer, nuansa komodifikasi makin terasa kental kala secara tengah berlangsung di negara- negara tumbuh. Alasannya terdapat kecenderungan negara- negara yang merangkul demokrasi jadi pasar konsumen yang kokoh untuk Amerika. Walaupun dikemas dalam konsep kepentingan kolaboratif, kepentingan ekonomi Amerika Serikat jauh lebih mengemuka. Bagaimanapun demokrasi memanglah suatu fenomena yang berkepanjangan. Masa depan demokrasi merupakan proses yang tiada henti, elemen- elemen demokrasi hendak timbul serta tumbuh dalam bermacam tingkatan serta tahapan dengan tingkatan kecepatan yang berbeda- beda di tiap negeri.

HASIL dan PEMBAHASAN

Keadaan di Indonesia, ketidak - sempurnaan perkembangan elemen demokrasi serta politik membuat demokrasi cuma aplikasi prosedural serta cenderung diwarnai oleh kepentingan elit politik. Perihal ini diperparah dengan kultur koruptif yang secara historis memberi warna dinamika kekuasaan di Indonesia, sehingga membuat demokrasi tidak lebih dari kepanjangan tangan kapitalisme serta perebutan duit. Instan, demokrasi di Indonesia dikala ini sangat diwarnai oleh money politics, citra, serta komodifikasi. Partai- partai politik di Indonesia jadi salah satu pemicu utama dari runtuhnya sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Diawali pada masa kabinet awal Ali Sastroamidjojo (Juli 1953 - Juli 1955), setelah itu kabinet yang dipandu Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956), serta terakhir kabinet kedua Ali Sastroamidjojo (Maret 1956 - Maret 1957).

Semacam yang ditulis Herbert Feith (1962), Daniel Lev (1966), serta John Legge (1972), proses dari penyusutan keyakinan terhadap partai politik diawali pada kurun waktu 1949, setelah itu secara de facto dengan kondisi darurat militer pada dini 1957 tentara nasional Indonesia secara politik berfungsi signifikan, sampai kesimpulannya secara formal jadi demokrasi terpimpin pada pertengahan 1959. Kurang lebih sepanjang 10 tahun partai politik pada waktu itu tidak bisa memelihara keyakinan konstituennya, paling utama sehabis pemilihan universal pada 1955 sudah berlangsung secara baik serta mencederai ekspektasi kalau pemerintah yang dibangun unsur- unsur partai politik bisa mewujudkan mandatnya buat sediakan lapangan pekerjaan, dan mendirikan sarana kesehatan serta pembelajaran yang layak pada warga luas. Dikala ini partai politik Indonesia generasi Masa Reformasi sudah berdiri rata- rata lebih dari 10 tahun.

Pasti saja penyelenggaraan pemilihan universal yang berlangsung relatif mudah semenjak 1999 butuh diapresiasi selaku instrumen demokrasi serta sepatutnya sistem demokrasi Indonesia telah wajib lebih terkonsolidasi dengan partai politik jadi aktor politik utamanya. Dapat dikatakan parlemen (diketahui dengan DPR) serta

partai politik Indonesia dikala ini dari segi otoritas memiliki peranan yang sama ataupun apalagi lebih dari partai politik pada 1950- an.

Tidak bisa dipungkiri kalau kelahiran demokrasi di Indonesia bawa cerita yang tidak senantiasa manis. Tetapi demikian, keterbukaan politik yang dialami belum lama ini, perkembangan civil society, serta kebebasan media sudah jadi pengendalian permasalahan serta penataan langkah komunikasi partai kepada warga lewat media tidak berjalan dengan efisien. Sehingga permasalahan yang terjalin disikapi dengan tidak pas malah melahirkan polemik yang sangat panjang. PDIP serta Partai Nasional Demokrat menempati urutan berikutnya dengan 9,2% serta 5,0%. Media memandang permasalahan internal partai serta dinamika politik internal tidak memperoleh penindakan yang baik sehingga memunculkan banyak polemik yang berujung pada krisis partai. Partai- partai politik akhir- akhir ini pula banyak dikritik sebab tidak maksimal dalam melaksanakan pengkaderan di internal partai, sehingga rawan terbentuknya transaksional. Tidak hanya itu, parpol pula banyak dikritik sebab enggan menampilkan kesungguhannya dalam menghasilkan tradisi demokrasi politik internal yang baik dan oligarki.

Respon serta Strategi Parpol dalam Mengalami Krisis, Dalam menyikapi krisis yang mengenai, tiap- tiap partai politik mempunyai cara- cara yang berbeda baik dalam membagikan respon ataupun dalam strategi penindakan krisis. Secara totalitas ada 3 jenis gimana partai politik membagikan respon serta strategi ialah: (1) Proaktif, ialah dengan mengambil langkah yang pas kala krisis terjalin. Nasdem serta Hanura ialah 2 partai yang masuk jenis didalamnya. (2) Adaptif, ialah cenderung memandang suasana kala terjalin krisis. Partai Golkar serta PDI Perjuangan masuk dalam jenis ini. (3) Reaktif, ialah mengambil langkah yang tidak pas kala terjalin krisis. Partai Demokrat serta PKS terletak dalam jenis ketiga.

Demokrat dinilai warga hadapi krisis sebab banyaknya permasalahan yang mendera baik konflik internal ataupun permasalahan korupsi. Content anlysis dari 15 media massa nasional menyajikan informasi yang seragam menimpa posisi partai politik yang dinilai lagi hadapi krisis. Bisa diasumsikan kalau kekuatan media selaku penyebar data sanggup membentuk opini publik. Partai Demokrat yang sangat banyak diberitakan menimpa krisis ialah persentase 34,2 %. Perihal tersebut disebabkan permasalahan korupsi yang mengenai para kader Demokrat. Setelah itu disusul oleh partai Golkar dengan 24,3 % sebab permasalahan yang nyaris seragam ialah korupsi. PKS dengan 20,3 % pula banyaknya pemberitaan permasalahan korupsi serta setelah itu PDIP 9,2 % kemudian Nasdem 5 persen disebabkan konflik internal. Dengan terdapatnya survei tersebut menampilkan tingkatan keyakinan publik terhadap partai politik menyusut.

Evaluasi publik menimpa banyaknya partai yang hadapi krisis disebabkan bermacam berbagai aspek. Aspek korupsi kader mendominasi komentar publik dengan 73,2 %, setelah itu terdapatnya konflik internal yang terjalin dalam badan partai sebanyak 10,8 %, Aspek lain- lain sebanyak 8,9 % serta Pelanggaran etika sebanyak 7,0 %. Berikut merupakan matriks yang menggambarkan faktor- aspek yang membuat partai politik kehabisan keyakinan publik, korupsi masih jadi aspek sangat dominan yang sanggup meruntuhkan kepercayaan publik kepada partai politik. Ironis bila setelah itu publik menghukum partai politik dengan melaksanakan aksi golput.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut, krisis partai politik yang memiliki magnitudo semakin besar dalam dua tahun meningkatkan keakraban para anggota kelompok oraganisasi dan menghargai perbedaan yang ditemukan dalam konflik dan mengatasinya melalui suatu proses sinergitas untuk meningkatkan kekuatan organisasi atau kelompok. Oleh sebab itu, perlu ada penguasaan masalah dan pengalaman serta ketenangan dalam mengelola krisis sehingga luas dampak krisis dapat dikendalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2011). *komunikasi politik, filsafat, paradigma, teori, tujuan, stategi, dan komunikasi politik indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Kasali, R. (2003). *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*. Jakarta. Kencana
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik (khalayak dan efek)*. Bandung. Remadja Rosdakarya